

INDOTEXTILES

The Indonesian Textiles, Apparel & Fashion Community Reference



WORLD TEXTILES JOURNAL

DAIKIN CHEMICAL SOUTHEAST ASIA CO., LTD.

No. 2345, Binang Tower at Asean VPT Floor Unit 2003, 1411, Sukkurul Road,
Bangkok Sub-City 15, Bangkok District 15, Bangkok 10150, Thailand.
Tel: +66-2-279-2511

Daftarlah! Scan QR code ini untuk informasi

UNIDYNE



Biaya Logistik Perlu Perhatian Pemerintah

Di tengah kondisi pasar yang belum pulih baik domestik maupun ekspor, kinerja industri TPT nasional kali ini terhambat oleh mahalnya biaya angkut yang meningkat hampir 4 kali lipat ditambah sulitnya mendapatkan peti kemas terutama untuk pasar tradisional yang berada di wilayah tersebut. negara tujuan ekspor utama.

Di sini sekali lagi diperlukan intervensi pemerintah agar kinerja ekspor TPT tetap terjaga diiringi penguasaan pasar dalam negeri. Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pemulihan industri TPT nasional.

Bulan ini kami meluncurkan INDOTEXTILES TV yang dapat diakses melalui Channel kami di Youtube, Instagram dan Tiktok. Semoga dapat memudahkan pembaca dalam mengakses informasi yang kami sajikan dengan lebih mudah dan cepat. Terima kasih atas dukungan Anda sejauh ini.

Salam,
Tim Redaksi

ISI EDISI ke-78

Berita Utama

- Industri Tekstil Indonesia Mengalami Kontraksi di Triwulan II 2024

Berita Terbaru

- Dugaan Penyelundupan Tekstil dari China Senilai Rp59,2 Triliun Dibongkar
- Pengusaha: Permintaan Tindakan Tegas dari Pemerintah
- Permendag No. 8 Tahun 2024 Dikritik, Pemerintah Belum Rencanakan Revisi
- Sri Mulyani Perpanjang Aturan Bea Masuk untuk Produk Tekstil dan Karpet Impor
- AK Tekstil Solo Jalin Kerjasama dengan 17 Industri Tekstil
- Kinerja Industri Tekstil Terus Merosot: Permintaan Menurun dan Payung Hukum Belum Jelas
- AMTI Anggap Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal Hanya Pencitraan
- Industri Tekstil Terpuruk, PHK Massal Melanda: Pentingnya Peran UU Sandang
- Pelaku Usaha Tekstil Desak Pemecatan Sri Mulyani, Dinilai Gagal Atasi Impor Ilegal
- Penguatan Rupiah ke Rp15.400 per USD: Dorongan Positif bagi Industri Tekstil dan Manufaktur
- Pabrik Tekstil Tutup, Pengusaha Modest Fashion Sulit Cari Bahan Baku
- Lonjakan Impor dari China Menghantam Industri Dalam Negeri Indonesia
- Harapan API: Industri Tekstil Indonesia Maju Seajar dengan Pangan dan Perumahan
- Kebangkitan Industri Tekstil Jawa Barat: Ekspor Garmen ke AS Sebagai Penanda
- Jumlah PHK Januari-Agustus 2024 Melonjak, Mencapai 45.762 Pekerja

BERITA UTAMA

Industri Tekstil Indonesia Mengalami Kontraksi di Triwulan II 2024



Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia mengalami kontraksi yang cukup signifikan pada triwulan II tahun 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa industri ini mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,03 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Meskipun angka ini tampak kecil, pertumbuhan industri TPT dan pakaian jadi secara quarter-to-quarter (qtq) terkontraksi lebih besar, yaitu sebesar 2,63 persen.

Faktor Penyebab Kontraksi

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menyampaikan bahwa kontraksi ini terjadi baik secara tahunan maupun kuartalan. Hal ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam industri tekstil Indonesia yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak terkait.

Salah satu penyebab utama kontraksi ini adalah serangkaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan tekstil. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat, mengungkapkan bahwa PHK ini dipicu oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang

terkait dengan impor tekstil. Peraturan ini dianggap menjadi pemicu utama gelombang PHK di industri tekstil.

Tantangan Daya Saing

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa daya saing industri tekstil Indonesia terus menurun. Banyak perusahaan tekstil global yang merelokasi pabrik mereka ke negara lain seperti Vietnam, Bangladesh, dan bahkan Ethiopia. Alasan utama mereka adalah biaya produksi yang relatif lebih tinggi di Indonesia, termasuk biaya logistik.

Bhima juga menyoroti kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap industri tekstil. Ia menyebut bahwa kebijakan pemerintah cenderung tidak konsisten dan sering kali berpindah-pindah fokus. Misalnya, dorongan terhadap industrialisasi di sektor pakaian jadi dan alas kaki belum selesai, namun sudah beralih ke hilirisasi nikel. Ketidakfokusan ini membuat industri manufaktur, termasuk tekstil, kekurangan stimulus dan insentif dari pemerintah.

Persaingan dengan Barang Impor

Industri tekstil domestik juga terdesak oleh barang-barang impor, baik yang masuk melalui jalur legal maupun ilegal. Barang impor yang dijual di ritel dan e-commerce sering kali jauh lebih murah dibandingkan produk lokal, sehingga merugikan pelaku usaha domestik. Bhima menambahkan bahwa insentif untuk menjadi importir atau reseller lebih besar dibandingkan menjadi produsen industri pengolahan.

Faktor Ekonomi Makro

Kondisi makro ekonomi seperti suku bunga yang tinggi dan daya beli masyarakat yang rendah juga turut mempengaruhi industri tekstil. Nilai tukar rupiah yang melemah membuat bahan baku impor menjadi lebih

mahal, sehingga menambah beban biaya produksi.

Kesimpulan

Industri tekstil Indonesia menghadapi tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Diperlukan kebijakan yang konsisten dan terfokus untuk mendukung industri ini agar dapat bersaing di pasar global. Selain itu, perlindungan terhadap pelaku usaha domestik dari gempuran barang impor juga harus ditingkatkan. Hanya dengan langkah-langkah ini, industri tekstil Indonesia dapat kembali bangkit dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.



BERITA TERBARU

Dugaan Penyelundupan Tekstil dari China Senilai Rp59,2 Triliun Dibongkar Pengusaha: Permintaan Tindakan Tegas dari Pemerintah

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan adanya dugaan penyelundupan tekstil senilai Rp59,2 triliun dari China, yang diduga kuat terjadi berdasarkan laporan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Meskipun belum ada bukti konkret, Direktur Eksekutif API, Danang Girindawardana, menyebutkan bahwa modus operandi penyelundupan ini bisa dilacak melalui analisis data perdagangan antara China dan Indonesia.

Menurut Danang, dugaan ini dapat diusut lebih lanjut dengan membandingkan data ekspor tekstil dari China ke Indonesia dengan data impor yang diterima oleh Indonesia dari China. Selisih antara kedua data ini bisa menjadi indikasi adanya barang yang masuk secara ilegal.



"Kalau dari API, kami belum tahu itu angka selundupan. Tetapi nilai selundupan bisa diperoleh dari selisih data ekspor China ke Indonesia vs data impor Indonesia dari China," ujar Danang.

Ia menambahkan bahwa proses penyelundupan tersebut tidak mungkin dilakukan melalui jalur-jalur tikus karena pengiriman tekstil dalam jumlah besar menggunakan kontainer, yang pasti melewati pintu masuk pelabuhan internasional. Hal ini mengindikasikan adanya peran oknum yang membantu meloloskan barang-barang ilegal tersebut di pelabuhan.

Danang mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas dengan menghentikan praktik impor ilegal ini. Salah satu langkah yang disarankan adalah dengan memberlakukan tarif bea masuk yang tinggi terhadap produk garmen dan tekstil impor. Namun, ia mengkritik bahwa saat ini masih banyak oknum pejabat yang bersikap ambigu. Di satu sisi, mereka seolah-olah prihatin terhadap ribuan pekerja yang terkena PHK, namun di sisi lain, mereka diduga melindungi importir gelap.

"Sebenarnya kalau pemerintah berniat melakukan perbaikan, bisa saja dilakukan audit terhadap persetujuan impor (PI) dan realisasi impor. Publikasikan data importasi yang disebut-sebut sebanyak 26 ribu kontainer itu untuk mencegah terjadi lagi di masa depan," tegas Danang.

Tuntutan dari API ini menegaskan perlunya ketegasan dari pemerintah dalam mengatasi praktik penyelundupan yang merugikan industri tekstil nasional serta mengancam lapangan kerja bagi jutaan pekerja di sektor ini.

Permendag No. 8 Tahun 2024 Dikritik, Pemerintah Belum Rencanakan Revisi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap banyaknya kritik dari pelaku usaha yang menilai kebijakan tersebut berdampak negatif pada industri tekstil.

Kritik dari Industri dan Usulan Revisi

Permendag No. 8 Tahun 2024 merupakan perubahan ketiga atas Permendag No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Kebijakan ini menuai banyak penolakan dari para pelaku usaha di berbagai sektor, termasuk industri tekstil. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, sebelumnya meminta agar pemerintah mengevaluasi Permendag tersebut atau kembali memberlakukan Permendag No. 36 Tahun 2023.

Pemerintah Buka Ruang Evaluasi

Meskipun demikian, Airlangga menilai bahwa kebijakan pemerintah bisa dievaluasi di masa depan. "Ya tentunya kan kebijakan

pemerintah bisa kita evaluasi, tapi tahap awal ini kita harus lihat apa yang bisa dilakukan," ujar Airlangga usai konferensi pers One Map Policy Summit di Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2024. Saat ini, pemerintah masih fokus untuk melihat lebih jauh penerapan aturan baru yang membatasi impor.

Respon Pemerintah terhadap Keluhan Industri Tekstil

Pada 25 Juni 2024, Presiden Joko Widodo menyelenggarakan rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta untuk merespons banyaknya industri tekstil lokal yang gulung tikar. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa rapat tersebut membahas keluhan dari pelaku industri tekstil yang beberapa di antaranya terpaksa tutup dan menghadapi ancaman PHK massal.

Usulan Pengetatan Kebijakan Impor

Untuk merespons isu ini, pemerintah mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali pengetatan kebijakan dan pengaturan impor yang sebelumnya sudah tertuang dalam Permendag No. 36 Tahun 2023. Usulan ini diajukan oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dengan harapan dapat membendung gelombang PHK yang dialami industri tekstil.

Fokus pada Penerapan Aturan Baru

Meskipun ada desakan untuk merevisi Permendag No. 8 Tahun 2024, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih fokus untuk melihat penerapan aturan baru tersebut. Evaluasi kebijakan tetap menjadi opsi di masa depan, tetapi saat ini langkah awal yang diambil adalah memantau efektivitas penerapan aturan yang ada.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi industri tekstil, pemerintah diharapkan dapat menemukan solusi terbaik untuk melindungi industri lokal sekaligus menjaga keseimbangan ekonomi. Evaluasi kebijakan

impor dan dialog dengan para pelaku usaha menjadi langkah penting dalam menghadapi situasi ini.

Sri Mulyani Perpanjang Aturan Bea Masuk untuk Produk Tekstil dan Karpas Impor

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah secara resmi melanjutkan kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTA) untuk produk kain, karpas, dan tekstil penutup lainnya yang diimpor ke Indonesia. Kebijakan ini akan berlaku selama tiga tahun ke depan, seperti yang tercantum dalam dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru, yaitu PMK Nomor 48 Tahun 2024 dan PMK Nomor 49 Tahun 2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa kebijakan ini diterbitkan sebagai langkah untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, yang saat ini masih berjuang untuk pulih dari dampak pandemi COVID-19. Ia menekankan pentingnya keselarasan kebijakan ini dengan arah pengembangan industri nasional serta menjaga daya saing industri tekstil domestik.

"Penerbitan kebijakan trade remedies untuk industri tekstil ini dilakukan dengan memperhatikan keselarasan rantai industri agar sesuai dengan arah pengembangan industri nasional serta dapat menjaga daya saing industri tekstil di dalam negeri," ungkap Febrio.

Perpanjangan kebijakan ini, menurut Febrio, sangat diperlukan karena subsektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) masih belum kembali ke tingkat pertumbuhan sebelum pandemi. Penurunan permintaan pasar, baik domestik maupun ekspor, serta persaingan global yang semakin ketat, menjadi tantangan besar bagi industri ini. Kondisi ini

juga mempengaruhi serapan tenaga kerja di sektor TPT yang menurun dari 3,98 juta pekerja pada 2023 menjadi 3,87 juta pekerja pada 2024.

Selain tantangan global, industri TPT Indonesia juga menghadapi peningkatan impor produk tekstil, terutama dari Tiongkok. Hal ini menambah tekanan pada kinerja industri tekstil nasional, yang telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah mengingat pentingnya sektor ini dalam menyerap tenaga kerja.

Dalam upaya mendukung industri tekstil nasional, pemerintah terus memantau situasi ini dan telah merumuskan berbagai solusi. Di antaranya, transformasi industri tekstil dengan memanfaatkan rantai pasok global, penciptaan nilai tambah, serta peningkatan daya saing melalui berbagai kebijakan insentif fiskal seperti Tax Holiday, Tax Allowance, Super Tax Deduction untuk vokasi dan penelitian & pengembangan (R&D), serta insentif kawasan ekonomi khusus.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan kebijakan trade remedies yang meliputi pengenaan BMTD dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) pada produk impor tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian serius akibat lonjakan barang impor atau praktik dumping dari negara lain.

Febrio juga mengingatkan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, pengenaan BMTD dan BMAD dilakukan untuk mencegah ancaman kerugian yang diderita oleh industri dalam negeri akibat lonjakan jumlah barang impor atau adanya praktik dumping.

Kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah hingga saat ini termasuk PMK Nomor 176/PMK.010/2022 tentang pengenaan BMAD atas impor produk Serat

Pakaian (Polyester Staple Fiber), PMK Nomor 46/PMK.101/2023 tentang BMTP atas impor Benang dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial, serta PMK lainnya yang mengatur pengenaan bea masuk pada berbagai produk tekstil dan aksesorinya.

Dengan perpanjangan aturan ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi industri tekstil nasional, menjaga daya saingnya di tengah kompetisi global, serta mempertahankan lapangan kerja bagi jutaan pekerja di sektor ini



AK Tekstil Solo Jalin Kerjasama dengan 17 Industri Tekstil



Akademi Komunitas Industri dan Produk Tekstil (AK Tekstil) Solo baru-baru ini menandatangani perjanjian kerjasama dengan 17 industri tekstil di Aula Kampus AK Tekstil. Kerjasama ini merupakan bagian dari upaya AK Tekstil untuk memperluas jaringan mitra industri dan meningkatkan ketersediaan lulusan di dunia usaha.

Menurut Direktur AK Tekstil Solo, Wawan Ardi Subakdo, institusi ini telah menjalin kerjasama dengan berbagai industri tekstil di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Saat ini, AK Tekstil memiliki lebih dari 60 mitra industri, dan terdapat 45 mitra yang perlu memperbarui nota kesepahaman (MoU) mereka. Wawan menjelaskan bahwa meski baru sebagian dari mitra yang diperbaharui, pihaknya menargetkan untuk memperbarui semua perjanjian kerjasama hingga akhir tahun.

“Kami berkomitmen untuk memperbarui 45 perjanjian kerjasama yang ada, dan hari ini kami telah menandatangani perjanjian dengan 17 industri tekstil. Selain wilayah Jawa Tengah dan DIY, kami juga menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Banten dan Jawa Timur. Target kami adalah menggandeng 60 mitra aktif untuk mencapai 100 persen ketersediaan lulusan di dunia usaha dan industri,” kata Wawan.

Dalam kesempatan yang sama, Harrison Sialen, Pengurus Bidang Sumber Daya Manusia dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mengungkapkan bahwa AK Tekstil Solo kini menjadi kampus berskala nasional dengan mahasiswa yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia, termasuk Kalimantan, Sumatra, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Harrison menambahkan bahwa lulusan AK Tekstil diproyeksikan bisa langsung bekerja tanpa masa tunggu.

“Sejak awal penerimaan mahasiswa baru, AK Tekstil sudah menjalin kerjasama dengan industri mitra. Proses akademis di kampus meliputi testing, wawancara, dan psikotes, sedangkan proses seleksi akhir dilakukan oleh industri mitra,” jelas Harrison.

Kurikulum pendidikan di AK Tekstil Solo dirancang dengan pendekatan 30 persen teori dan 70 persen praktik. Setiap semester,

mahasiswa menjalani dua bulan pelatihan in-house dan dua bulan praktik langsung di industri. Setiap tahun, AK Tekstil meluluskan sekitar 240 mahasiswa yang siap bekerja, sedangkan permintaan dari industri untuk tenaga kerja lebih dari 300 orang.

Dengan jalinan kerjasama ini, AK Tekstil Solo bertujuan untuk semakin meningkatkan kualitas lulusannya dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di industri tekstil.



Kinerja Industri Tekstil Terus Merosot: Permintaan Menurun dan Payung Hukum Belum Jelas

Industri tekstil dan pakaian jadi di Indonesia mengalami tekanan yang signifikan, dengan data terbaru dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukkan kontraksi sebesar 0,03 persen secara tahunan (year-on-year). Penurunan ini menjadi sinyal yang mengkhawatirkan bagi sektor industri yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2024 juga merosot ke angka 49,3, menandakan sektor manufaktur telah memasuki fase kontraksi setelah sebelumnya selama 34 bulan berturut-turut berada dalam fase ekspansi. Menurunnya PMI ini terutama disebabkan

oleh lonjakan produk tekstil impor yang membanjiri pasar domestik, sehingga menekan produksi tekstil lokal.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, penurunan kinerja industri tekstil telah menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Dalam Sidang Kabinet yang berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN), Presiden Jokowi menyatakan kekhawatirannya terhadap kontraksi PMI manufaktur, yang juga dialami oleh beberapa negara di Asia. Penurunan terbesar terjadi pada komponen output, yang menjadi perhatian utama pemerintah.

Selain itu, Agus menambahkan bahwa tingginya beban impor bahan baku, dipicu oleh fluktuasi nilai rupiah dan banjirnya produk impor, turut melemahkan permintaan domestik. Hal ini mengakibatkan penurunan kepercayaan diri dan optimisme pelaku industri, yang tercermin dari penurunan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Juli 2024 menjadi 52,4, turun sedikit dari 52,5 pada bulan sebelumnya.

Agus menekankan pentingnya penggunaan bahan baku lokal dan perlindungan terhadap industri dalam negeri untuk mengatasi masalah ini. Presiden Jokowi juga menekankan perlunya mencari pasar nontradisional dan potensi pasar baru sebagai tujuan ekspor produk-produk Indonesia, guna meningkatkan daya saing industri nasional.

Kondisi ini semakin diperparah dengan ketidakpastian regulasi yang dirasakan oleh para pelaku industri. "Tidak adanya kepastian hukum yang jelas menjadi salah satu faktor utama menurunnya optimisme para pelaku industri," ujar Agus.

Menurutnya, meskipun kondisi ekonomi global saat ini belum stabil, pemerintah harus berupaya menciptakan iklim usaha yang

kondusif dengan regulasi yang memihak kepada pelaku industri. "Diperlukan koordinasi yang serius dan benar-benar tepat sasaran untuk mengatasi tantangan ini," pungkasnya.

Dengan kondisi yang semakin menantang, dukungan kebijakan yang jelas dan tegas dari pemerintah menjadi kunci untuk memulihkan kinerja industri tekstil dan manufaktur di Indonesia, sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

AMTI Anggap Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal Hanya Pencitraan

Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI), Agus Riyanto, mengkritik kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor. Menurutnya, satgas ini masih belum efektif dalam menjalankan tugasnya dan lebih banyak berfokus pada publikasi daripada tindakan nyata. Agus menyampaikan pandangannya melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 17 Agustus 2024.

Agus menyayangkan tidak adanya kabar mengenai pengungkapan atau penangkapan pelaku impor ilegal yang merusak ekosistem tekstil nasional. Ia menganggap bahwa kinerja satgas lambat dan penindakan yang dilakukan tidak optimal. "Satgas ini hanya mempublikasi melalui konferensi pers tanpa menindak satupun perusahaan, gudang, maupun pemilik usaha tersebut," ujarnya.

Ia juga menyebutkan beberapa masalah yang menghambat kinerja satgas, seperti koordinasi yang buruk, kurangnya data yang memadai, dan sumber daya yang terbatas. Agus bahkan menyarankan agar satgas dibentuk melalui Keputusan Presiden

(Keppres) dan bukan Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag). Hal ini, menurutnya, akan memberikan kewajiban pertanggungjawaban langsung kepada Presiden dan menciptakan reformasi nyata dalam satgas, bukan sekadar pencitraan. "Kalau memang tidak optimal, lebih baik bubarkan saja. Lalu ganti dengan Keppres, bukan Kepmendag," tambahnya.

Sebagai bukti kinerja satgas, pada laporan pertama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama anggota satgas berhasil melakukan penindakan terhadap barang impor ilegal senilai kurang lebih Rp 40 miliar. Agus menilai bahwa impor ilegal tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu penyebab utama kerugian dan kebangkrutan banyak pabrik tekstil di Indonesia.

AMTI pun telah menggelar unjuk rasa untuk mendesak pemerintah agar serius melindungi industri tekstil dari persaingan tidak sehat di pasar domestik. Aksi yang diadakan pada 17 Juli 2024 itu melibatkan ratusan peserta, termasuk IKM Tekstil, pekerja, dan mahasiswa, yang menuntut tanggung jawab pemerintah atas maraknya impor ilegal dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi.

Agus juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera memberantas impor tekstil ilegal, terutama impor borongan yang selama ini dianggap sebagai penyebab utama kerugian negara dan industri tekstil nasional. Ia menegaskan bahwa industri tekstil harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan, telah menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 tahun 2024 yang menetapkan pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor. Satgas ini terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian

Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Industri Tekstil Terpuruk, PHK Massal Melanda: Pentingnya Peran UU Sandang

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Indonesia sedang mengalami masa sulit, di tengah tekanan persaingan yang semakin ketat dengan produk impor. Penurunan utilitas produksi yang signifikan menjadi salah satu indikator utama krisis ini. Pada Juni 2024, utilitas di sektor hulu hanya mencapai 55,28%, sementara di sektor hilir turun menjadi 77,4%. Kondisi ini memaksa banyak perusahaan tekstil untuk mengurangi pengeluaran, salah satunya dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.

Data dari BPJS Ketenagakerjaan mencatat bahwa sebanyak 46.000 pekerja di sektor TPT telah kehilangan pekerjaan akibat krisis ini. Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB), Nandi Herdianan, menyatakan bahwa persaingan tidak sehat dengan produk TPT impor telah menyebabkan penurunan drastis dalam utilitas mesin, terutama di kawasan Bandung Raya. Dari 70% kapasitas produksi yang dihentikan, hanya sekitar 30% mesin yang masih beroperasi.

Nandi menambahkan, dampak dari penurunan produksi ini bukan hanya pada angka PHK yang tinggi, tetapi juga merambah pada sektor konveksi di berbagai daerah seperti Tasikmalaya dan Garut. Dengan ratusan ribu pekerja yang terkena PHK, industri TPT benar-benar terpuruk.

Menghadapi situasi ini, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyerukan pentingnya segera disahkannya Undang-Undang (UU) Sandang. Harrison Silaen, Pengurus Pusat Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) API, mengungkapkan bahwa UU Sandang akan memberikan perlindungan bagi industri TPT domestik, dari pengadaan material hingga perdagangan ekspor dan impor. Langkah ini diharapkan dapat menahan laju PHK dan mengembalikan daya saing industri dalam negeri.

RUU Sandang sendiri telah diajukan sejak tahun 2023, namun hingga kini masih belum ada kejelasan lebih lanjut. Nandi mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret, mengingat urgensi peraturan ini bagi kelangsungan industri TPT di Indonesia. Selain melindungi industri dari gempuran produk impor, UU Sandang juga diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi di sektor TPT yang saat ini harus berurusan dengan banyak kementerian dan instansi.

Tak hanya itu, masalah lain yang dihadapi industri TPT adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan teknologi yang sudah usang. Harrison menekankan bahwa keterbatasan SDM, terutama di level supervisor, serta umur mesin produksi yang sudah tua, menjadi hambatan besar dalam meningkatkan daya saing industri ini.

Dengan sekitar 80% mesin produksi di industri TPT yang berusia lebih dari 20 tahun, teknologi yang digunakan sudah jauh tertinggal dari negara-negara pesaing.

Harrison berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus pada modernisasi teknologi dan peningkatan keterampilan SDM di sektor TPT agar industri ini bisa kembali bersaing di pasar global.

Krisis yang melanda industri TPT ini membutuhkan solusi komprehensif, dan pengesahan UU Sandang bisa menjadi langkah awal yang sangat penting untuk menyelamatkan industri ini dari keterpurukan lebih lanjut.

Pelaku Usaha Tekstil Desak Pemecatan Sri Mulyani, Dinilai Gagal Atasi Impor Ilegal

Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) secara tegas mendesak Presiden Jokowi untuk segera memecat Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Desakan ini dilatarbelakangi oleh penilaian bahwa Sri Mulyani menjadi penyebab utama dari ambruknya industri tekstil lokal. Koordinator AMTI, Agus Riyanto, menyatakan bahwa hingga saat ini praktik importasi borongan terus terjadi tanpa ada tindakan tegas atau larangan dari Kementerian Keuangan.



"Hal ini sangat mendesak, kami menghindari keterpurukan yang lebih dalam lagi dalam tiga bulan ke depan sebelum pemerintahan baru dimulai," ungkap Agus dalam pernyataan resminya pada Selasa (20/8/2024). Ia menambahkan bahwa pemerintah seolah merestui praktik impor

ilegal yang merugikan industri tekstil dalam negeri.

Meskipun pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan, telah membentuk Satuan Tugas (SATGAS) untuk menanggulangi impor ilegal, Agus menilai langkah ini tidak cukup efektif. Kondisi industri tekstil justru semakin memburuk. Menurutnya, SATGAS hanya beroperasi di pasar dalam negeri, sementara masalah utama terletak di pelabuhan, di mana Bea Cukai dinilai terus membuka pintu bagi praktik importasi ilegal. "Hingga saat ini sepertinya tidak ada niatan dari Menteri Keuangan untuk mengatasi permasalahan ini," tuturnya.

Sikap serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya, Nandi Herdiaman, yang menyatakan bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) masih terpuruk, meskipun pada bulan Juni lalu sempat ada sedikit perbaikan dengan adanya pesanan seragam. "Kami sangat mengharapkan belas kasihan dari pemerintah untuk menolong kami. Di sini kami mengemis keadilan kepada Menteri Keuangan untuk segera melarang praktik impor borongan," tegas Nandi.

Desakan ini mencerminkan keresahan yang mendalam di kalangan pelaku industri tekstil, yang merasa bahwa kebijakan pemerintah saat ini tidak memadai untuk melindungi industri lokal dari gempuran impor ilegal. Jika tidak ada tindakan tegas dalam waktu dekat, dikhawatirkan industri tekstil nasional akan semakin terpuruk, bahkan sebelum pemerintahan baru terbentuk.



Penguatan Rupiah ke Rp15.400 per USD: Dorongan Positif bagi Industri Tekstil dan Manufaktur

Pada Agustus 2024, nilai tukar rupiah menunjukkan penguatan signifikan, mencapai level Rp15.400 per dolar AS. Penguatan ini dinilai sangat positif untuk mendukung sektor-sektor ekonomi Indonesia, terutama yang memiliki kandungan impor tinggi. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menegaskan bahwa penguatan rupiah merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam konferensi pers terkait hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Perry Warjiyo menjelaskan bahwa stabilisasi penguatan rupiah berdampak baik terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu manfaat utamanya adalah penurunan harga barang-barang impor, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada inflasi yang lebih rendah, terutama inflasi yang dipengaruhi oleh harga barang impor atau imported inflation.

Penguatan rupiah yang terjadi dengan cepat, menembus level Rp15.425 per dolar AS dalam waktu hanya sembilan hari setelah sebelumnya berada di level Rp16.000-an, memberikan dorongan besar bagi sektor-

sektor dengan kebutuhan impor tinggi. Perry menyebutkan bahwa industri tekstil dan manufaktur, yang merupakan dua sektor besar dalam perekonomian Indonesia, sangat diuntungkan oleh penguatan ini. Kedua sektor ini tidak hanya berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga sangat bergantung pada bahan baku impor untuk operasionalnya.

Namun, Perry juga mengingatkan bahwa meskipun penguatan rupiah membawa banyak manfaat, BI tidak memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus menguat tanpa batas. Dalam rapat sebelumnya dengan Badan Anggaran (Banggar), BI memperkirakan nilai tukar rupiah akan berada di kisaran Rp15.300 hingga Rp15.700 per dolar AS pada tahun 2025.

Dengan penguatan ini, sektor-sektor industri yang memiliki kandungan impor tinggi diharapkan dapat memaksimalkan keuntungan dari nilai tukar yang lebih baik. Di sisi lain, BI tetap fokus pada kebijakan yang dapat menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan, memastikan bahwa penguatan rupiah ini berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.

Pabrik Tekstil Tutup, Pengusaha Modest Fashion Sulit Cari Bahan Baku

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia tengah mengalami masa-masa sulit. Sejak pandemi COVID-19 melanda, pasar ekspor tekstil anjlok drastis, mengakibatkan banyak pabrik garmen harus menutup operasinya dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Situasi semakin memburuk dengan masuknya produk tekstil impor ilegal yang merusak pasar dalam negeri. Kondisi ini turut

mempengaruhi industri modest fashion yang saat ini tengah berkembang di Indonesia.

Lira Krisnalisa, Founder and Chief Creative Officer dari Jenna and Kaia, menyatakan bahwa tekanan yang dialami oleh industri TPT sangat dirasakan dalam bisnis modest fashion. Penutupan pabrik garmen telah mengakibatkan pasokan kain menjadi tidak stabil, sehingga pengusaha di bidang ini kesulitan mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Kondisi ini memaksa para pelaku bisnis modest fashion untuk mencari strategi baru dalam menghadapi tantangan tersebut.

Salah satu strategi yang diambil adalah mendorong efisiensi dalam proses produksi. Pengusaha dituntut untuk lebih cermat dalam mengelola sumber daya yang ada, sehingga dapat meminimalisir biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas produk. Selain itu, beberapa pengusaha juga mulai memproduksi label baru yang mampu bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Ini dilakukan untuk tetap bisa bertahan dan menjaga eksistensi di tengah gempuran produk asing yang masuk ke pasar Indonesia.

Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait dengan pasokan bahan baku. Pengusaha modest fashion juga harus mampu menjaga kualitas produk agar tetap diminati oleh konsumen lokal. Di tengah persaingan yang semakin ketat, inovasi dan kreativitas menjadi kunci untuk tetap bisa bersaing. Pengusaha dituntut untuk selalu mengikuti tren terbaru dan mampu menawarkan sesuatu yang berbeda dari produk-produk lainnya di pasar.

Lira Krisnalisa mengungkapkan bahwa meskipun tantangan yang dihadapi cukup berat, ia tetap optimis bahwa industri modest fashion di Indonesia dapat terus berkembang. Dengan dukungan dari

berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, diharapkan industri ini dapat bangkit kembali dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Kesimpulannya, industri modest fashion di Indonesia saat ini tengah menghadapi tekanan yang besar akibat krisis yang melanda industri TPT. Namun, dengan strategi yang tepat dan inovasi yang terus dilakukan, pengusaha di bidang ini masih memiliki peluang untuk bertahan dan berkembang di masa depan.



WORLD TEXTILES JOURNAL

Lonjakan Impor dari China Menghantam Industri Dalam Negeri Indonesia

Industri dalam negeri Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar akibat lonjakan impor produk dari China. Banjirnya produk-produk murah asal China ke pasar Indonesia telah memberikan pukulan keras bagi produsen lokal, terutama di sektor tekstil dan garmen. Para pengusaha garmen, baik dari industri rumahan maupun pabrik besar, merasakan dampak langsung berupa penurunan pangsa pasar dan kesulitan bersaing dengan harga produk impor yang jauh lebih murah.

Lonjakan impor ini juga diperparah oleh meningkatnya pembelian produk secara daring (online), yang semakin memperketat persaingan bagi produsen lokal. Akibat dari kondisi ini, banyak pabrik tekstil terpaksa menghentikan operasinya, dan PHK massal tidak dapat dihindari. Dari Januari hingga Juli 2024, sedikitnya 12 pabrik tekstil di Indonesia telah menutup operasi mereka, menyebabkan lebih dari 12.000 pekerja kehilangan pekerjaan.

Menyikapi situasi ini, pemerintah Indonesia berupaya melindungi industri dalam negeri dengan mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif impor hingga 200 persen pada beberapa produk dari China, termasuk tekstil, pakaian, alas kaki, elektronik, keramik, dan kosmetik. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa langkah ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan industri mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Namun, penerapan tarif tinggi ini bukan tanpa risiko. China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dengan total perdagangan mencapai lebih dari \$127 miliar pada 2023. Penaan tarif yang lebih tinggi berpotensi memicu pembalasan dari pihak China, yang dapat berdampak negatif pada hubungan perdagangan antara kedua negara. Di sisi lain, tarif yang tinggi juga diharapkan dapat mendorong produsen China untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, yang dapat memberikan dorongan bagi ekonomi lokal.

Di daerah seperti Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dikenal sebagai pusat produksi tekstil, dampak dari lonjakan impor ini sangat terasa. Ribuan pekerja tekstil di daerah tersebut kehilangan pekerjaan tetap dan kini bekerja secara bergiliran dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi ini semakin memperburuk situasi yang sudah sulit sejak masa pandemi COVID-19, di mana banyak

pekerja terpaksa beralih ke bisnis e-commerce untuk bertahan hidup.

Industri tekstil Indonesia kini menghadapi tantangan besar untuk tetap bertahan di tengah gempuran produk impor yang semakin intens. Peningkatan impor produk China sebagian besar disebabkan oleh ketegangan perdagangan antara AS dan China, yang menyebabkan peningkatan tarif Amerika atas barang-barang China. Namun, kondisi ini juga mencerminkan meningkatnya perdagangan intra-Asia sebagai hasil dari berbagai pakta perdagangan bebas yang diberlakukan di kawasan ini.

Selain Indonesia, negara-negara lain di Asia, seperti Thailand, juga merasakan dampak negatif dari membanjirnya produk murah dari China. Untuk melindungi produsen lokal, pemerintah Thailand telah memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 7 persen atas semua produk impor, sebagai tindakan darurat yang berlaku dari Juli hingga Desember 2024.

Indonesia sendiri pernah mengeluarkan peraturan untuk memperketat pengawasan terhadap lebih dari 3.000 barang impor pada Desember 2023. Namun, peraturan tersebut akhirnya dibatalkan karena dianggap menghambat aliran bahan impor yang dibutuhkan untuk produksi lokal. Kini, pemerintah sedang mempertimbangkan langkah lain, seperti kenaikan tarif impor, untuk melindungi industri dalam negeri.

Produsen besar seperti PT Eksonindo Multi Product Industry juga merasakan dampak dari lonjakan impor ini. Perusahaan yang memproduksi pakaian dan aksesoris di Jawa Barat ini berharap pemerintah menaikkan bea masuk atas barang jadi dari China, namun tidak pada bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi lokal. Sebagian besar bahan yang digunakan perusahaan ini berasal dari China, sehingga penerapan tarif

tinggi pada bahan mentah dapat mengganggu rantai pasokan dan berdampak negatif pada produksi.

Kesimpulannya, lonjakan impor dari China telah memberikan tekanan besar bagi industri dalam negeri Indonesia, terutama di sektor tekstil dan garmen. Pemerintah kini berada di persimpangan jalan, antara melindungi produsen lokal dengan tarif impor yang tinggi, atau mempertahankan hubungan perdagangan yang baik dengan China. Tantangan ini memerlukan solusi yang bijak agar industri dalam negeri dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan global yang semakin ketat.



Harapan API: Industri Tekstil Indonesia Maju Sejajar dengan Pangan dan Perumahan

Pelaku industri tekstil di Indonesia terus menggaungkan harapan agar sektor ini semakin maju dan sejajar dengan industri pangan dan perumahan. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menekankan bahwa sektor tekstil, sebagai bagian dari kebutuhan primer masyarakat, harus mendapatkan perhatian yang setara dengan sektor-sektor lain seperti pangan dan perumahan.

Wakil Ketua API Jawa Tengah, Liliek Setiawan, menekankan pentingnya keberadaan payung hukum yang kuat untuk industri tekstil, agar pengembangannya sebagai industri kebutuhan primer dapat didasarkan pada regulasi yang jelas dan mendukung. Liliek berpendapat bahwa dengan adanya kebijakan yang tepat, industri tekstil bisa mencapai kemandirian dan menjadi "tuan rumah" di negeri sendiri. Dia mengutip keberhasilan pembuatan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) sebagai contoh bagaimana kebijakan yang kuat dapat mendorong kemajuan suatu sektor.

Dalam kunjungan Nanny Hadi Tjahjanto, istri Menkopohukum Hadi Tjahjanto, ke Akademi Komunitas Tekstil Solo, Liliek menyambut dengan optimisme. Menurutnya, kunjungan ini bukan hanya memberikan angin segar bagi akademi, tetapi juga bagi seluruh pelaku tekstil di Jawa Tengah. Kunjungan ini menunjukkan perhatian pemerintah yang semakin kuat terhadap sektor tekstil, yang saat ini masih menghadapi tantangan besar, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat serangan produk impor yang tidak terkontrol.

Liliek juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah dalam mengembangkan industri tekstil. Dia membandingkan dengan Amerika Serikat, di mana pemerintah masih aktif memberikan dukungan kepada para petani kapas, sehingga negara tersebut berhasil menjadi produsen kapas terbaik dunia. Sayangnya, upaya Liliek sejak tahun 2005 untuk menggandeng seluruh ekosistem tekstil di Indonesia dalam mengembangkan kapas belum berhasil, yang ia yakini disebabkan oleh kurangnya dukungan pemerintah.

Nanny Hadi Tjahjanto dalam kunjungannya juga menyoroti beberapa aspek penting untuk pengembangan Akademi Komunitas Tekstil Solo ke depan, termasuk rencana

pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan bahan baku tekstil. Namun, yang paling penting menurut Liliek adalah mewujudkan kemandirian sandang, sebuah cita-cita yang sudah lama diimpikan oleh para pendiri bangsa.

Dengan dorongan dari berbagai pihak, diharapkan industri tekstil Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi sektor yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global, sejajar dengan industri pangan dan perumahan.

Kebangkitan Industri Tekstil Jawa Barat: Ekspor Garmen ke AS Sebagai Penanda



Industri tekstil di Jawa Barat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah melewati masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19. Salah satu indikasi positif ini terlihat dari keberhasilan PT Daese Garmin dalam melakukan ekspor garmen ke Amerika Serikat (AS). Pada 23 Agustus 2024, PT Daese Garmin berhasil mengekspor jas senilai Rp2,6 miliar ke AS. Pelepasan ekspor ini dilakukan secara simbolis di sela-sela acara West Java Festival 2024 yang berlangsung di Gedung Sate, Bandung.

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, menyatakan harapannya bahwa ekspor ini akan menjadi momentum bagi kebangkitan industri tekstil di Jawa Barat, khususnya dalam meningkatkan kembali aktivitas ekspor. "Kita harapkan ini menjadi momentum buat industri tekstil khususnya

ekspor," ujar Bey. Meskipun saat ini PT Daese Garmin baru bisa mengekspor sekitar 40 kontainer per bulan, angka ini masih belum setara dengan kapasitas ekspor sebelum pandemi. Sebelum COVID-19 melanda, perusahaan ini mampu mengekspor hingga 15 kontainer per minggu. Namun, Bey optimis bahwa jumlah ekspor akan terus meningkat seiring dengan pemulihan industri tekstil.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, menambahkan bahwa PT Daese Garmin secara rutin mengekspor produk tekstil, khususnya jas, ke AS dengan volume enam kontainer setiap minggu. Ekspor simbolis satu kontainer ini dilakukan mengingat keterbatasan ruang di Jalan Diponegoro yang menjadi lokasi penyelenggaraan West Java Festival 2024. "Sebetulnya per minggunya cukup banyak. Ini cuma simbolis, Rp2,6 miliar ke Amerika. Dan ini jadi pembangkit kebangkitan tekstil kita," ujar Noneng.

Dengan total nilai ekspor mingguan mencapai Rp15,6 miliar, PT Daese Garmin membawa angin segar bagi industri tekstil di Jawa Barat, terutama di tengah ketidakpastian global yang disebabkan oleh konflik geopolitik. Selain ekspor jas oleh PT Daese Garmin, ekspor serentak juga dilakukan di beberapa kota dan kabupaten lainnya di Jawa Barat, termasuk Cirebon yang mengirim produk rotan ke pasar internasional.

Momentum ekspor ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi sektor tekstil Jawa Barat untuk bangkit dan kembali berjaya, mengingat peran pentingnya dalam perekonomian daerah dan nasional.

Jumlah PHK Januari-Agustus 2024 Melonjak, Mencapai 45.762 Pekerja

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang signifikan pada tahun 2024. Hingga 23 Agustus 2024, tercatat sebanyak 45.762 pekerja mengalami PHK. Angka ini menunjukkan peningkatan yang mencolok dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023, dengan selisih sekitar 5.000 pekerja lebih tinggi.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa tren PHK pada tahun ini terus mengalami peningkatan. "Naik dibandingkan tahun lalu. Di Juli saja disparitasnya sudah sekitar 4.000-an lebih. Sekarang pasti naik 5.000 dibanding dengan Agustus 2023," jelas Indah saat dikonfirmasi oleh Kontan.co.id, Minggu (25/8).

Menurut Indah, sektor yang paling terdampak oleh gelombang PHK ini adalah sektor manufaktur atau industri pengolahan, terutama di bidang tekstil, garmen, dan alas kaki. Sebaran wilayah yang paling banyak mengalami PHK adalah Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat. Namun, Indah belum merinci angka kasus PHK di masing-masing daerah tersebut.

Indah juga mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan PHK pada tahun ini. Salah satu faktor utama adalah ketidakmampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan pergeseran ke toko daring atau e-commerce. "Mereka yang belum siap menghadapi dinamika ini, antara persaingan, situasi global, regional, dan perubahan gaya hidup konsumen, akhirnya mereka tidak kuat. Jadi mereka terpaksa PHK," terang Indah.

Selain itu, beberapa perusahaan masih merasakan dampak kerugian dari pandemi COVID-19 yang diperparah oleh ketegangan isu geopolitik yang terjadi beberapa waktu terakhir. Meski demikian, Kemnaker

berupaya memfasilitasi mediasi antara pelaku usaha dan pekerja terkait isu PHK ini, memastikan bahwa hak-hak pekerja yang terdampak tetap terpenuhi.

"Inshaallah terpenuhi, tapi memang tidak semua mulus. Pasti ada dinamika, karena yang melakukan PHK ini kan dalam keadaan yang tidak baik bisnisnya," tambah Indah.

Dengan situasi ini, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung industri dan pekerja agar bisa bertahan menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

